



Biro Hukum dan HAM

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385

<http://jdih.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengajuan Permohonan Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota;
2. Raperda yang dievaluasi adalah RPJPD, RPJMD, APBD Murni, Pertanggungjawaban dan Perubahan, Pajak dan Retribusi Daerah, Rencana Tata Ruang dan RDTR dan Raperda tentang Desa;
3. Softcopy dan Hardcopy Raperda Kabupaten/Kota yang sudah diparaf oleh Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan Ketua Pansus DPRD Kabupaten/Kota.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Hukum dan HAM

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385

<http://jdih.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang:

1. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan
2. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.

Evaluasi terhadap rancangan perda kab/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi hasil konsultasi dari pemerintah pusat

1. Bupati/walikota menyampaikan rancangan perda kabupaten/kota kepada Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati/walikota
2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam melakukan evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang: 1. pajak daerah dan retribusi daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan; dan 2. tata ruang daerah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan selanjutnya Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tata ruang.
3. Evaluasi terhadap rancangan perda kab/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat rekomendasi hasil konsultasi dari pemerintah pusat



Biro Hukum dan HAM

Jl. Diponegoro No. 22 Bandung 40115 0224231385

<http://jdih.jabarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Biro Hukum dan HAM

Waktu Penyelesaian

15 Hari

15 hari untuk satu produk hukum

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota

Pengaduan Layanan

email : birohukumfasilitasi@gmail.com

Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

Jalan Diponegoro No.22 Bandung Telp (022) 4231385